

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**KECAMATAN DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2020**

Jalan Mayjend Sungkono No. 61 Dawarblandong

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2022
CAMAT DAWARBLANDONG

NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si.
Pembina
NIP. 19810207 200501 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Kinerja Tahunan.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
BAB III A. Capaian Kinerja.....	14
B. Analisis Capaian Kinerja	14
C. Realisasi Anggaran	22
BAB IV Penutup	25
A. Kesimpulan	25

Lampiran-lampiran

1. Matrik Renja Perubahan Tahun 2021
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021
3. IKU
4. Struktur Organisasi

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto juga dimaksudkan sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan

kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Kecamatan Dawarblandong dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Dawarblandong. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN DAWARBLANDONG

1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

a. Aspek Geografi

Kecamatan Dawarblandong termasuk wilayah Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah .5,948,750. Km², tepatnya terletak sekitar 18 Km sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto.

Secara geografis Kecamatan Dawarblandong terletak di kisaran 112°33' Bujur Timur dan antara 7°31' Lintang Selatan dengan ketinggian 138 meter di atas permukaan laut.

Kecamatan Dawarblandong memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
- Sebelah timur : Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
- Sebelah selatan : Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto
- Sebelah barat : Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan

Kecamatan Dawarblandong beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Jenis tanah di wilayah Kecamatan Dawarblandong ada 2 jenis, yaitu alluvial (tanah yang berasal dari endapan sungai) yang terdapat pada sisi utara, dan jenis regusol (tanah yang berkapur di daerah bukit dan batu bekuan dan intermedier) yang terdapat di bagian Utara Kecamatan Dawarblandong.

Tabel 1.1
Tinggi dan Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah*) (Km2)
1	CENDORO	35	271,412
2	SIMONGAGROK	35	341,155
3	SUMBERWULUH	36	298,240
4	CINANDANG	40	321,519
5	TALUNBLANDONG	42	212,803
6	GUNUNGSARI	45	436,132
7	DAWARBLANDONG	48	337,252
8	PULOREJO	35	332,734
9	JATIROWO	35	298,076
10	S U R U	33	291,258
11	BANGERAN	36	382,323
12	P U C U K	49	462,655
13	BANYULEGI	32	313,414
14	GUNUNGAN	39	226,992
15	BRAYUBLANDONG	34	500,276
16	TEMUIRENG	32	385,433
17	MADURESO	35	399,668
18	RANDEGAN	33	167,247
	Kec. Dawarbl	138	5,948,750

Keterangan :***) Luas daerah tidak termasuk hutan Negara**

Sumber : Statistik Kecamatan Dawarblandong 2014

Secara administratif wilayah Kecamatan Dawarblandong terdiri dari 18 desa. Luas wilayah Kecamatan Dawarblandong secara keseluruhan adalah .5,948,750 km².

b. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021 sebesar 53.324 jiwa. Dari data yang ada, pertumbuhan penduduk rata-rata dalam 6 tahun terakhir mencapai 1,62 %. Jumlah penduduk dalam 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah penduduk Kecamatan Dawarblandong Tahun 2016 – 2021

Jumlah Penduduk	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
Laki-laki	26.230	26.414	26.517	26.374	26.663	26.615
Perempuan	27.052	26.717	26.825	26.456	26.332	26.709
Total	53.282	53.131	53.342	52.830	52.995	53.324

Sumber data : Seksi Pemerintahan Kecamatan Dawarblandong

D. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Dawarblandong disusun dan dibentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dawarblandong mempunyai tugas pokok dan fungsi organik sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut :

A. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan ;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati ;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan ;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan ;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan; dan
10. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Selain tugas sebagaimana tersebut di atas, Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Struktur Organisasi.

Susunan organisasi Kecamatan Dawarblandong berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Kemasyarakatan
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pelayanan.

Berkaitan dengan permasalahan utama (strategic issued) serta Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dipengaruhi 2 (dua) faktor startegis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh managemen Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.
2. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Volume pekerjaan yang ada sudah ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto yang kurang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2021, Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto masih membutuhkan kurang lebih 4 orang Pegawai .
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas kurang memadai
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada dengan baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Dawarblandong dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

- Faktor Peluang Organisasi

1. Kondisi Wilayah Kecamatan Dawarblandong termasuk daerah yang mempunyai lahan produktif, sehingga merupakan daerah yang prospektif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
2. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Dawarblandong ;

3. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.
- Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi kebersihan lingkungan.
 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
 3. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
 4. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto selama tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Dawarblandong Tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Dawarblandong pada tahun 2021 sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021
SEBELUM REVIU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Indeks Kepuasan ASN	81 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	79 %
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Sosial	90 %

--	--	--	--

RKT HASIL PERBAIKAN / REVIU TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Indeks Kepuasan ASN	81 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	79 %
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Sosial	90 %

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Berikut ini Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto sebagai berikut

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Indeks Kepuasan ASN	81 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	79 %
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Kesejahteraan Sosial	90 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.051.028.779,00	PAPBD 2021
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 22.000.000,00	PAPBD 2021
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 117.800.000,00	PAPBD 2021
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 70.000.000,00	PAPBD 2021
5.	Program Pembinaan Dan	Rp 83.000.000,00	PAPBD 2021

	Pengawasan Pemerintahan Desa		
TOTAL ANGGARAN TAHUN 2021	Rp	4.343.828.779,00	PAPBD 2021

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Dawarblandong tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Dawarblandong tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	79%	85,26%	100%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	90%	94,59%	100%

- b) **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Sasaran pertama indikator pertama yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan pada Kecamatan Dawarblandong dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 98,15 %. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran Strategis 1 Indikator 2

Sasaran pertama indikator kedua yaitu Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Dawarblandong dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 94,59 %. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD Kecamatan Dawarblandong pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81 Baik	84,5 Baik	-	-
	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	78%	100%	-	-
				-	-

Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	2%	(6,36%)		
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	79%	-	85,53 %	
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	79%	-	98,42 %	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	79%	-	-	82,75%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	90%	-	-	93,59%

c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun renstra

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81 Sangat Baik	78 Baik	97,5%
	Cakupan pelayanan umum dan perijinan	80%	78%	97,5%
Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	4% Dari tahun ke nol renstra (tahun 2016)	(6,36%)	0%
Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP	81%	85,26%	100%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	81%	98,42%	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase Pelayanan Perizinan	79%	98,15%	100%

publik	dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan			
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	90%	94,59%	100%

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	85,26%	-	-
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum,	94,59%	-	-

	Kesejahteraan Sosial			
--	----------------------	--	--	--

e) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

Tabel 3.5
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	22.000.000	0,47%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	270.800.000	5,84%

Tabel 3.6
COST PER OUTCOME

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	85,26%	100%	22.000.000	17.368.400	85,26%
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		1300 Pelayanan	1300 Pelayanan	100%	22.000.000	21.596.500	98,15%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	44 Kegiatan	44 Kegiatan	100%	270.800.000	231.910.950	94,59%
1. Program Pemberdayaan Masyarakat		24 Kegiatan	24 Kegiatan	100%	117.800.000	100431600	85,26%
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	70.000.000	67.681.000	96,69%
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		16 Fasilitasi	16 Fasilitasi	100%	83.000.000	77.918.000	93,18%

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	85,26%	14,74%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	100%	94,59%	5,14%

B. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021 sebesar Rp. 4.343.828.779,00,- penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.563.219.413,00 - atau 83 % dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9

PERBANDINGAN JUMLAH ANGGARAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TA. 2021		% CAPAIAN PROGRAM
				TARGET	REALISASI	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	865.900,00	87%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	974.750,00	97%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.956.065.185,00	2.287.583.361,00	77%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000,00	9.677.300,00	97%
		Administrasi Kepegawaian			-	

		Perangkat Daerah				
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	11.200.000,00	11.016.000,00	98%
		Administra si Umum Perangkat Daerah			-	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.987.500,00	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.000.000,00	235.591.400,00	96%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	14.900.000,00	99%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.946.750,00	99%
			Penyediaan Bahan/Material	16.787.634,00	16.730.000,00	100%
			Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinata h Daerah			-	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	635.000.000,00	582.195.000,00	92%
		Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerintah			-	

		an Daerah				
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.400.960,00	20.137.152,00	57%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.400.000,00	41.400.000,00	100%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.000.000,00	34.362.000,00	93%
			Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.175.000,00	27.075.000,00	100%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-	

			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000, 00	4.907.500, 00	98%
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	17.000.000 ,00	10.839.000 ,00	64%
3	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN				-	
		Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa			-	
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	60.000.000 ,00	55.902.000 ,00	93%
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.800.000 ,00	44.529.600 ,00	77%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM				-	
		Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketenteram an dan Ketertiban Umum			-	

			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000,00	37.931.000,00	95%
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30.000.000,00	29.750.000,00	99%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				-	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			-	
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.000.000,00	11.950.000,00	100%
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.500.000,00	25.140.000,00	99%
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.500.000,00	8.450.000,00	99%

			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.000.000,00	9.749.500,00	81%
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	25.000.000,00	22.628.700,00	91%
			JUMLAH	4.343.828.779,00	3.563.219.413,00	83%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa semua indikator sudah hampir mencapai target.

Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

- Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
- Pada tahun mendatang optimalisasi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

Dari total belanja langsung SKPD Kecamatan Dawarblandong Tahun 2021 sebesar Rp. 4.343.828.779,00. dapat terserap sebesar Rp. 3.563.219.413,00 atau 83%.

B. SARAN

Untuk meningkatkan Kinerja Kecamatan Dawarblandong pada tahun mendatang, maka disarankan untuk setiap pengelola program melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Mengupayakan kesesuaian atau kecukupan anggaran dengan kebutuhan untuk kegiatan serta pegawai di Kecamatan Dawarblandong.
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya BPKAD, BAPPEDA, Bagian Tata Usaha dan Bagian Hukum Setda Kab. Mojokerto serta instansi terkait lainnya.


CAMAT DAWARBLANDONG
NORMAN HANDHITO, S.IP., M.Si.
Rembina
NIP. 19810207 200501 1 006